

BAB IV

PENUTUPAN

4.1 Kesimpulan

Persepsi Birokrasi di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Klaten berdasarkan pada rekapitulasi jawaban responden pada masing-masing aspek, sebagai berikut:

1. Aspek Pengarahan, diperoleh rata-rata jawaban responden 3,17 dengan nilai maksimum 3,89 dan nilai minimum 2,67, dikategorikan baik.
2. Aspek Motivasi, diperoleh rata-rata jawaban responden 2,96 dengan nilai maksimum 4,00 dan nilai minimum 1,60, dikategorikan baik.
3. Aspek Pengambilan Keputusan, diperoleh rata-rata jawaban responden 3,08 dengan nilai maksimum 3,90 dan nilai minimum 1,70, dikategorikan baik.

Secara Keseluruhan, hasil rekapitulasi dari Persepsi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten diperoleh rata-rata jawaban responden 3,06 dengan nilai maksimum 3,64 dan nilai minimum 2,32 yakni masuk dalam kategori Baik. Artinya berdasarkan pada persepsi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, Bupati Hj. Sri Mulyani memiliki kualitas kinerja yang baik, dilihat dari aspek pengarah, motivasi, dan pengambilan keputusan sehingga mampu menciptakan efektivitas kepemimpinan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten dengan posisi kekosongan Wakil Bupati.

Persepsi Persepsi Birokrasi di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Klaten berdasarkan pada rekapitulasi jawaban responden pada masing-masing aspek, sebagai berikut:

1. Aspek Membangun *Networking* (Jejaring Kerja), diperoleh rata-rata jawaban responden 3,31 dengan nilai maksimum 4,00 dan nilai minimum 2,45, dikategorikan baik.
2. Aspek Akuntabilitas, diperoleh rata-rata jawaban responden 3,26 dengan nilai maksimum 3,89 dan nilai minimum 2,11, dikategorikan baik.

Secara Keseluruhan, persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten berdasarkan pada rekapitulasi jawaban responden menunjukkan rata-rata 2,74 dengan nilai maksimum 3,29 dan nilai minimum 1,92 masuk dalam kategori Baik. Artinya berdasarkan Persepsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) yang berkedudukan sebagai lembaga legislatif juga menunjukkan pola hubungan yang baik dengan Bupati Hj. Sri Mulyani, artinya mekanisme *check and balance* dalam membentuk pemerintahan daerah berjalan dengan baik terutama berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten.

4.2 Saran

Selama masa kepemimpinannya, Bupati Hj. Sri Mulyani mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terhadap urusan-urusan pemerintahan di Kabupaten dengan baik dan sesuai dengan sasaran beserta target yang ditetapkan sebelumnya, bahkan dengan posisi kekosongan wakil bupati selama kepemimpinannya pada periode 2017-2021 Bupati Hj. Sri Mulyani mampu menggerakkan seluruh birokrasi untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya tanpa merasa kewalahan. Akan tetapi, mengingat urgensinya pengisian jabatan wakil bupati dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka sebaiknya dilakukan pemilihan untuk wakil bupati Kabupaten Klaten pada periode 2017-2021 sesuai dengan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Bupati Hj. Sri Mulyani dalam melaksanakan urusan pemerintahannya hingga masa kepemimpinannya berakhir tetap berjalan sesuai dengan yang semestinya, yakni terdapat kedudukan Wakil Bupati yang bertanggungjawab membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

4.3 Kelemahan Studi

Persepsi Birokrasi dalam penelitian ini hanya menunjukkan persepsi birokrasi dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten saja, sehingga belum mencakup birokrasi secara keseluruhan yakni seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Klaten dalam menunjukkan persepsi terhadap kepemimpinan Bupati Hj. Sri Mulyani dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Klaten untuk Periode 2017-2021, sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan bisa mencakup birokrasi secara keseluruhan di Kabupaten Klaten.